

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN
PEMERINTAH DAERAH, AKUNTABILITAS KINERJA
DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY PADA PEMERINTAH PROVINSI DI
INDONESIA (2019-2022)**

Bunga Jungti Marlinda¹⁾, Rukmini²⁾, LMS Kristiyanti³⁾
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Correspondence		
Email: bungajm16@gmail.com ¹⁾ , rukmini.stie.aas@gmail.com ²⁾ , lms.kristiyanti@yahoo.co.id ³⁾	No. Telp:	
Submitted: 24 Juli 2024	Accepted: 30 Juli 2024	Published: 31 Juli 2024

:

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh signifikan Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja dan Opini Audit Terhadap Audit Delay pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan 136 sampel yang digunakan. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. Sedangkan Opini Audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Audit Delay.

Kata kunci: Audit Delay, Akuntabilitas Kinerja, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the significant influence of Regional Government Size, Level of Regional Government Dependency, Performance Accountability and Audit Opinion on Audit Delay in Provincial Governments in Indonesia. The type of data used is secondary data with 136 samples used. The data collection method is the documentation method. The data analysis method used is descriptive statistics. The classical assumption tests used are the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. Hypothesis testing uses the SPSS 23 test. The results of the study show that the size of the Regional Government. The level of Regional Government Dependency and Performance Accountability have a significant effect on Audit Delay, while Audit Opinion shows no effect on Audit Delay.

Keyword: *Audit Delay, Performance Accountability, Local Government Size, Audit Opinion, Level of Regional Government Dependency*

Pendahuluan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan tidak hanya ada untuk dunia usaha, tapi juga untuk pemerintah, seperti laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pelaporan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah (APBD).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah



dipahami. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus dilaporkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran. LKPD yang telah diterima oleh BPK akan selanjutnya diaudit. Jika LKPD tidak dikirim dengan tepat, audit akan tertunda. Setelah pemeriksaan selesai, BPK harus menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPR tidak lebih dari dua bulan setelah LKPD diterima oleh BPK. Penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah sering kali tidak seragam karena beberapa pemerintah daerah terlambat menyampaikan LKPD, yang dapat memburukkan citra kinerja keuangan. Audit delay adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit, yang diukur dari tanggal penutupan tahun baru sampai tanggal penyelesaian laporan audit independen. Seorang auditor independen adalah seorang anggota akuntan publik yang bekerja untuk pihak lain yang membutuhkan layanan audit. Tujuan auditor independen atau auditor adalah untuk mengurangi keterlambatan audit untuk memenuhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat banyak penelitian mengenai audit delay namun terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Gemilang & Pramita (2021), berpendapat bahwa audit delay tidak dipengaruhi oleh ukuran dan ketergantungan pemerintah daerah. Sebaliknya, opini dan hasil audit mempengaruhi audit delay. Penelitian Krisandri (2023), berpendapat bahwa keterlambatan audit di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tidak dipengaruhi atau tidak signifikan oleh opini audit, ukuran pemerintah daerah, hasil audit, kekuatan dan ketergantungan keuangan daerah. Penelitian Tullah et al. (2019) menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap keterlambatan audit, sedangkan tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterlambatan audit pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia selama tahun 2015-2016. Penelitian Putro (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja, temuan audit, opini auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay namun pada tipe pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay.

Menurut Gita Hardini & Sukirman (2016), Jika pemerintah daerah telah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan pernyataan dan penjelasan tentang kinerjanya, maka akan ada akuntabilitas kinerja yang baik. Menurut Afriani & Satyawan (2023), jika pemerintah daerah telah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan pernyataan dan penjelasan tentang kinerjanya, maka akan ada akuntabilitas kinerja yang baik. Berdasarkan latar belakang, beberapa alasan yang telah diuraikan di atas, dan untuk mendapatkan bukti empiris, penelitian tambahan tentang **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja dan Opini Audit Terhadap *Audit delay* Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia”**.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan 38 pemerintah provinsi di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode dokumentase. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang telah ada. Metode ini digunakan untuk menemukan dan mencatat data sekunder yang diperlukan untuk penelitian.

Data sekunder ini termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019-2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2019-2022, serta data Indeks SAKIP tahun 2019-2022 yang diterbitkan oleh Kemen- PAN.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Hasil Uji Asumsi
 - a. Normalitas

Menurut Ghozali (2016) Uji normalitas menentukan distribusi normal dalam model regresi variabel pengganggu atau residual. Apabila asumsi dilanggar, uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil karena uji t dan F menduga bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji kolmogrov smirnov digunakan untuk menguji normalitas data untuk setiap variabel. Jika nilai variabel residual Asymp.Sig (2 ekor) di atas 5% atau 0,05, maka data tersebut dianggap memiliki distribusi normal atau memenuhi uji normalitas. Sebaliknya, jika nilai variabel residual di bawah 5% atau 0,05, maka data tersebut dianggap tidak memiliki distribusi normal atau tidak memenuhi uji normalitas.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas *One sample Kolmpgrov Smirnov*

<i>Unstandardized Residual</i>	
N	136
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	0,053

Sumber : Output SPSS data diolah 2024

Menurut Ghozali (2016) Uji normalitas menentukan distribusi normal dalam model regresi variabel pengganggu atau residual. menunjukkan besarnya nilai test statistik Kolmogrov-Smirnov adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,053 ($0,000 > 0,05$). Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.

- b. Multikolinieritas

Uji multikolinearitas menurut Imam Ghozali (2016) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) dalam model regresi memiliki korelasi. Jika ada, maka korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat terganggu. Ada beberapa nilai yang biasa digunakan untuk mengetahui apakah variabel memiliki multikolinieritas atau tidak. Jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF lebih dari 10, maka variabel dianggap memiliki multikolinieritas. Jika nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih dari 10, maka variabel dianggap memiliki multikolinieritas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ukuran Pemerintah Daerah	0,839	1,192
Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	0,704	1,420
Akuntabilitas Kinerja	0,792	1,263
Opini Audit	0,987	1,013

Sumber : Output SPSS data diolah 2024

Uji multikolinieritas menurut Imam Ghozali (2016) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) dalam model regresi memiliki korelasi. Jika ada, maka korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat terganggu. Jika nilai Tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF lebih dari 10, maka variabel dianggap memiliki multikolinieritas. Jika nilai Tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih dari 10, maka variabel dianggap memiliki multikolinieritas. Pada tabel diatas menunjukkan nilai tolerance masing-masing variabel adalah Ukuran pemerintah Daerah sebesar 0,839. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah sebesar 0,704, Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,792, Opini Audit sebesar 0,987. Sedangkan nilai VIF variabel Ukuran pemerintah Daerah sebesar 1,192, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah sebesar 1,420. Akuntabilitas Kinerja sebesar 1,263, Opini Audit sebesar 1,013. Nilai tolerance semua variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi ini bebas dari masalah multikolinieritas.

c. Heteroskedastisitas

Uji Glejser digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Model regresi yang baik memiliki hasil signifikan lebih dari 0,05 atau 5%. Jika ada heteroskedastisitas, koefisien variabel regresi akan menjadi minimum dan interval kepercayaan akan melebar, sehingga hasil uji signifikan statistik tidak valid lagi. Menurut Ghozali (2018) Uji Glejser menguji hipotesis untuk mengetahui apakah ada indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Model	Sig.
1 (<i>Constant</i>)	0,294
Ukuran Pemerintah Daerah	0,727
Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	0,666
Akuntabilitas Kinerja	0,846
Opini Audit	0,314

Sumber : Output SPSS data diolah 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari semua variabel bebas adalah $> 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala Heteroskedastisitas.

d. Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam asumsi autokorelasi klasik atau korelasi antara residual pada saat pengamatan lain pada model regresi. Uji Run-test adalah instrumen uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi (*Run Test*)

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,86900
Cases < Test Value	68
Cases \geq Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	66
Z	-0,516
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,606

Sumber : Output SPSS data diolah 2024

Menurut Ghozali (2018), *Tests run* digunakan untuk menentukan apakah data residual muncul secara sistematis atau tidak. Metode pengambilan keputusan uji Durbin Watson adalah sebagai berikut: nilai Asymp. Sig. 2-tailed lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05 menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0.606 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

2. Pengujian Hipotesis
 - a. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	t hitung
(Costant)	1,157
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	- 0,350
Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (X2)	0,433
Akuntabilitas Kinerja (X3)	0,194
Opini Audit (X4)	-1,012

Sumber : Output SPSS data diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linier berganda yaitu variabel X1 (Ukuran Pemerintah Daerah) sebesar -0,350, variabel X2 (Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah) sebesar 0,433, variabel X3 (Akuntabilitas Kinerja) sebesar 0,194 dan variabel X4 (Opini Audit) sebesar -1,012. Maka diperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$\text{Audit delay} = 1,157 - 0,350X_1 + 0,433X_2 + 0,194X_3 - 1,012X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Audit delay

α = Konstanta.

B = Koefisien regresi

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

X3 = Akuntabilitas Kinerja

X4 = Opini Audit

Yang artinya dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 1,157 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka nilai *audit delay* sebesar 1,157
- Koefisien regresi Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 0,350 yang bertanda negatif menunjukkan bahwa, apabila nilai Ukuran Pemerintah Daerah meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan *Audit delay* sebesar 0,350.
- Koefisien regresi Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah sebesar 0,433 yang bertanda positif menunjukkan bahwa, apabila nilai Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah meningkat sebesar 1 satuan. maka akan meningkatkan *Audit delay* sebesar 0,433.
- Koefisien regresi Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,194 yang bertanda positif menunjukkan bahwa, apabila nilai Akuntabilitas Kinerja meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *Audit delay* sebesar 0,194.
- Koefisien regresi Opini Audit sebesar 1,012 yang bertanda negatif menunjukkan

bahwa, apabila nilai Opini Audit meningkatkan sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan *Audit delay* sebesar -1,012.

b. Uji F

Untuk mengetahui apakah model yang diuji memiliki tingkat kelayakan yang tinggi, atau apakah variabel yang digunakan mampu menjelaskan fenomena yang diamati (Ferdinand, 2014), uji kelayakan model dilakukan dengan melihat nilai signifikan F. Jika nilai signifikan F lebih dari 0,05, maka model dianggap tidak layak, dan jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka model dianggap layak.

Tabel 6
Hasil Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Square</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig</i>
Regression	3914,760	4	978,690	24,452	0,000
Residual	5243,202	131	40,024		
Total	9157,962	135			

Sumber : Output SPSS data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai F hitung $24,452 > F$ tabel 2,438240 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikansi tersebut kurang dari 0,05 oleh karena itu hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini telah layak digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis atau dengan kata lain penelitian ini layak digunakan untuk mengukur variable Y.

c. Uji t

Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai t-statistics lebih besar dari 1,96, sedangkan jika nilai t-statistics kurang dari 1,96 maka dianggap tidak signifikan. Menurut Ghozali, (2016) Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel Coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% (α 0,05).

Tabel 7
Hasil Uji t

Model	t hitung	t tabel	Sig	A
(Constant)	30,920	1,65613	0,000	0,05
Ukuran pemerintah Daerah	6,393	1,65613	0,000	0,05
Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	4,748	1,65613	0,000	0,05
Akuntabilitas Kinerja	-5,433	1,65613	0,000	0,05
Opini Audit	-1,501	1,65613	0,136	0,05

Sumber : Output SPSS data diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa t tabel adalah 1,65613. Sehingga pengujian hipotesis antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 -Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Audit delay didapat t hitung 6,393 lebih besar dari t tabel 1,65613 dengan sig. $0,000 < 0,05$. Karena nilai sig yang di dapat tingkat sign. $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Audit delay.

-Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Audit delay didapat t hitung 4,748 lebih besar dari t tabel 1,65613 dengan sig. $0,000 < 0,05$ Karena nilai sig. yang di dapat $<$ tingkat sign. $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti Tingkat Ketergantungan Pemerintah berpengaruh terhadap Audit delay.

-Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap Audit delay didapat t hitung -5,433 lebih kecil dari t tabel 1,65613 dengan sig. $0,000$, karena nilai sig. yang di dapat $0,000 <$ tingkat sign. $\alpha 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti Akuntabilitas Kinerja berpengaruh terhadap Audit delay.

-Pengaruh Opini Audit terhadap Audit delay didapat t hitung -1,501 lebih kecil dari t tabel 1,65613 dengan sig. $0,136$, karena nilai sig. yang di dapat $0,136 >$ tingkat sign. $\alpha 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Audit delay.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, menurut Imam Ghozali (2016), menunjukkan seberapa jauh variabel independen mampu menjelaskan variasi-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu, atau antara 0 dan 1.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	0,654	0,427	0,410	6,32649

Sumber : Output SPSS data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari analisis regresi nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,410 atau 41%. Hal ini berarti bahwa Audit delay dipengaruhi oleh variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja dan Opini audit sebesar 41%, sedangkan sisanya 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap *Audit delay*

Hasil uji t menunjukkan t hitung sebesar 6,393 $>$ t tabel sebesar 1,65613 dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Elfiana Syahyuni et al., 2018).

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap *Audit Delay*

Hasil uji t menunjukkan t hitung sebesar $4,748 > t$ tabel sebesar $1,65613$ dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa berarti dapat disimpulkan dari hipotesis yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap variabel *Audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Elfiana Syahyuni et al (2018) yang menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penundaan audit menunjukkan bahwa pemerintah akan menganggap penundaan audit sebagai hal yang dapat menghambat kinerja pemerintah daerah karena pencapaian dan hasil yang diperoleh pemerintah daerah tidak dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu.

Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Terhadap *Audit delay*

Hasil uji t menunjukkan t hitung sebesar $-5,433 < t$ tabel sebesar $1,65613$ dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja signifikan berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putro (2017) dan Afriani & Satyawati (2023) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit delay*

Hasil uji t menunjukkan t hitung sebesar $-1,501 < t$ tabel sebesar $1,65613$ dan tingkat signifikansinya $0,136 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa opini audit tidak signifikan berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Afriani & Satyawati, 2023) dan Elfiana Syahyuni et al (2018). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Vanesha & Syofyan, 2020) yang menunjukkan bahwa Opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja, dan pendapat audit berdampak pada penundaan audit. Penelitian ini dilakukan dengan model regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya tiga dari empat variabel independen yang diuji berdampak pada penundaan audit.

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap *audit delay* yang berarti bahwa ukuran pemerintah yang lebih besar cenderung memiliki operasi yang lebih kompleks seperti transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan ukuran pemerintah daerah yang lebih kecil. Semakin banyak transaksi yang perlu diperiksa auditor semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Maka besar kecilnya pemerintah daerah mempengaruhi pemerintah daerah dalam melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaporannya. Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap *audit delay* yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah pada pendanaan dari pemerintah pusat maka akan semakin banyak pendapatan transfer yang diberikan pemerintah pusat yang akan mengakibatkan transaksi yang dilakukan akan lebih banyak dan memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang mana hal tersebut memerlukan audit yang lebih detail dan memperpanjang waktu audit.

Variabel Akuntabilitas Kinerja berpengaruh terhadap *audit delay* yang berarti bahwa semakin tinggi skor yang didapatkan oleh kabupaten/kota maka semakin baik kinerja pemerintah di wilayah tersebut. Maka sistem instansi yang semakin baik akan mempengaruhi tingkat terjadinya keterlambatan penyampaian LKPD akan menurun. Variabel Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan opini audit merupakan hasil akhir dari proses audit dan bukan faktor yang mempengaruhi durasi proses audit. Kesimpulan dapat digeneralisasikan sesuai dengan masalah penelitian dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya.

Saran

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengurangi keterlambatan dalam penyampaian LKPD. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dan menambah variabel-variabel independen lainnya yang dapat berasal dari karakteristik auditor maupun pemerintah daerah sehingga dapat mengeneralisasi dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi *audit delay*. Meskipun opini audit tidak mempengaruhi *audit delay*, sebaiknya kualitas audit yang lebih baik dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit maka diharapkan pemerintah meningkatkan kualitas dan pelatihan auditor, mendukung instansi tentang pentingnya kepatuhan terhadap jadwal dan persyaratan audit dapat membantu mengurangi penundaan.

Daftar Pustaka

- Adiraya, I., & Sayidah, N. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas dan Opini Auditor terhadap *Audit delay*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2).
- Afriani, B. R., & Satyawan, M. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit delay* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2018 (Vol. 11, Issue 2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/195>
- Aprila, N., & Siska Pratiwi, D. (2017). Pengaruh Opini Audit dan Kualitas Auditor Terhadap *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia (Vol. 7, Issue 3).
- Elfiana Syahyuni, I., Arza, F. I., & Afriyanti, M. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap *Audit delay*.
- Gemilang, Y. A. K., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Temuan Audit terhadap *Audit delay*. *Borobudur Accounting Review*, 1, 78–88. <https://doi.org/10.31603/bacr.4895>
- Gita Hardini, Z., & Sukirman. (2016). Analisis Determinan *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. In *AAJ* (Vol. 5, Issue 1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa>
- Gupitasari, A. S. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan terhadap Durasi Proses Audit pada Pemerintah Daerah Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Krisandri, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit delay* Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2).
- Putra Bakar, M., Indra Arza, F., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., Akuntansi, J., & Ekonomi Universitas Negeri Padang, F. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Leverage Terhadap *Audit delay* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi*

Akuntansi,

1(3),

1168–1183.

<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/10>

- Putro, D. H. M. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Tipe Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Opini Auditor Terhadap *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Siregar, B. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap *Audit delay* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/> <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Riyanti, F. (2019). Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Profita*, 12(2), 171. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.001>
- Vanesha, A., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit Dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Petahana) Terhadap *Audit delay* Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2014-2018). In *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Issue 4). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/29>
- Verawati, N. M. A., & Wirakusuma, M. G. (2016). Pengaruh Pergantian Auditor Reputasi KAP, Opini Audit dan Komite Audit Pada *Audit delay*. *E-Jurnal Akuntansi Universita Udayana*, 17(1). <https://www.bpk.go.id/>
<https://www.menpan.go.id/site/>